

## BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi, juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi, serta, Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

### 4.1. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, terdiri atas:

1. dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2015 Tanggal 11 Desember 2015 perihal Penugasan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2016;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 348 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2014.

#### 4.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Jumlah Anggaran

Jumlah seluruh anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian dan Lembaga yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 sebesar Rp. 696.305.200.000,-. Alokasi anggaran Tugas Pembantuan tersebut bersumber dari 5 (lima) Kementerian, yaitu 1) Kementerian Pertanian sebesar Rp. 543.655.062.000,- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 3.693.500.000,- 3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 52.879.309.774,- dan 4) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp. 4.331.039.000,- serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 1.400.000.000,-

Pemberian anggaran Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Disamping itu, pemberian Tugas Pembantuan tersebut bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaspembantuankan merupakan urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah, yaitu 1) politik luar negeri, 2) pertahanan, 3) keamanan, 4) yustisi, 5) moneter dan fiskal nasional, 6) serta agama.

#### 4.3. Satuan Kerja yang Melaksanakan

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan senilai Rp. 1.513.402.184,00 yang bersumber dari 5 (lima) Kementerian tersebut, oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya didelegasikan untuk dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada 8 (delapan) OPD, yaitu:

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2. Dinas Perkebunan

3. Dinas Peternakan
4. Dinas Perikanan dan Kelautan
5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
6. Dinas Bina Marga
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tabel 4.1.  
Sumber Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2016

Kementerian	Alokasi Anggaran	Satuan Kerja Pelaksana
Kementerian Pertanian	Rp. 543.655.062.000	1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Peternakan
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp. 3.693.500.000	Dinas Perikanan dan Kelautan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 52.879.309.774	1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Dinas Bina Marga
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rp. 4.331.039.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 1.400.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

#### 4.4. Program Dan Kegiatan serta Pelaksanaannya

##### 4.4.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 memperoleh anggaran yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari 4 (empat) Direktorat Jenderal (Ditjen) Lingkup Kementerian Pertanian yaitu sebesar Rp. 500.348.604.000, yang terbagi dalam 3 (tiga) program utama sebagai berikut:

#### A. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

##### 1. Pelaksanaan Program

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, bersumber dari Ditjen Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.259.655.272.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.148.660.456.541,- atau 57,25%. Rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
- b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;
- c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;
- d. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan; dan

e. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Dengan Output kegiatan adalah:

- Penerapan Budidaya Kedelai 6.450 Ha, Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi 150 Ha;
- Penerapan Budidaya Padi 353.640 Ha, Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya 17.668 Ha;
- Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat 80 Ha;
- Dokumen Manajemen Tanaman Pangan 16 Dokumen; dan
- Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 1.334 unit, Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 3 unit.

Outcome kegiatan adalah:

- Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan; dan
- Terwujudnya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan mendukung peyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi berkelanjutan.

Tabel 4.2.  
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	259.665.272.000
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	13.186.740.000
Penerapan Budidaya Kedelai	12.477.522.000
Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	709.218.000
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	158.653.187.000
Penerapan Budidaya Padi	127.994.362.000
Penerapan Budidaya Jagung Dan Serealia Lainnya	30.658.825.000
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	3.123.375.000
Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat	3.123.375.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	752.819.000
Dokumen Manajemen Tanaman Pangan	752.819.000
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	83.949.151.000
Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	83.499.151.000
Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	450.000.000

## 2. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

Kebutuhan pangan masyarakat, khususnya padi dan palawija, sangat ditentukan oleh ketersediaan produksi. Produksi pangan yang memadai sangat ditentukan oleh faktor input yang tersedia, dimana salah satunya adalah sumber benih. Permasalahan yang sering dihadapi yaitu: 1) keterbatasan produksi benih. Hal ini dikarenakan pada saat tanam untuk

produksi benih (varietas unggul baru) terkena serangan organisme pengganggu tanaman dan bencana alam seperti kekeringan, sehingga perlu ada pengulangan tanam. Akibatnya jadwal tanam untuk penyediaan benih sumber di Balai Pengembangan Benih mundur sehingga benih yang dibutuhkan tidak cukup tersedia, disamping itu masalah lain yang terjadi yaitu: ketersediaan anggaran untuk proses budidaya yang kurang memadai dan tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan jadwal tanam mundur, 2) Terdapat pemblokiran akun pada output kegiatan, hal ini menyebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga berpengaruh terhadap pembangunan pertanian di Kabupaten serta terhadap penyerapan anggaran APBN dana Tugas Pembantuan TA. 2016.

b. Solusi:

Penyelesaian masalah tersebut yaitu: harus adanya program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat waktu tersedia karena proses budidaya sangat ditentukan oleh masa tanam.

B. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

1. Pelaksanaan Program

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, bersumber dari Ditjen Hortikultura dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.218.912.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.212.262.000,- atau 96,96%. Rincian Kegiatan sebagai:

- a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan; dan
- b. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

Dengan Output kegiatan adalah:

- Kawasan Sayuran Lainnya 11 Ha; dan
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura 8 laporan dan Layanan Perkantoran 12 bulan layanan.

Outcome kegiatan adalah: Terpenuhinya Konsumsi Cabai, Bawang Merah dan Aneka Produk Hortikultura Lainnya Dalam Negeri dan Ekspor.

Tabel 4.3.  
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	218.912.000
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan	114.850.000
Kawasan Sayuran Lainnya	114.850.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	104.062.000
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura	31.132.000
Layanan Perkantoran	72.930.000

## 2. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan:

Dalam kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan pada Dana Tugas Pembantuan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Walaupun permasalahan yang terjadi tidak berpengaruh langsung pada pelaksanaan kegiatan dari program yang telah ditetapkan, akan tetapi permasalahan ini berpengaruh terhadap jumlah produksi dari komoditas sayuran dimana produksi merupakan salah satu target indikator sasaran yang harus dicapai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Adapun permasalahan yang terjadi, antara lain :

- Masalah ketersediaan lahan di Jawa Barat pada komoditas sayuran menjadi permasalahan yang paling mendasar yang terjadi pada komoditas sayuran. Lahan merupakan salah satu faktor yang paling krusial dalam usaha meningkatkan produksi komoditas sayuran dan yang terjadi saat ini :
  - Banyaknya terjadi alih fungsi lahan di Jawa Barat. Seperti lahan pertanian berubah menjadi lahan properti;
  - Alih fungsi komoditas, banyaknya petani sayuran yang berubah haluan menjadi petani bidang pangan. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya program-program bantuan pemerintah saat ini yang mengutamakan pada bidang tanaman pangan; dan
  - Faktor iklim yang tentunya sangat berpengaruh besar pada pertanaman sayuran. Pada Tahun 2016 terjadi La-Nina (musim kemarau basah) yang mengakibatkan banyaknya serangan penyakit pada pertanaman sayuran.

b. Solusi:

Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan lahan komoditas sayuran, BUMN dalam hal ini diwakilkan oleh PTPN memberikan peluang/lahan perkebunan yang belum termanfaatkan agar dapat digunakan untuk pertanaman komoditas sayuran.

C. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

1. Pelaksanaan Program

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Terlaksananya pengembangan fasilitasi dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan perluasan areal pertanian. Program ini bersumber dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.240.464.420.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.231.819.780.615,- atau 96,41%. Rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian;
- b. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian;
- c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;
- d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- e. Fasilitas Pupuk dan Pestisida.

Dengan Output kegiatan adalah:

- Jaringan Irigasi Tertier 51.800 ha, Irigasi Air Permukaan 124 unit, Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim 210 unit;
- Cetak Sawah 2.300 Ha, Konservasi Lahan 4 Ha;
- Alat dan Mesin Pertanian 3.616 unit, Layanan Perkantoran 12 bulan;
- Layanan Perkantoran 12 Bulan; dan
- Layanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 27 layanan, Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida 26 paket.

Outcome kegiatan adalah: Penambahan Luas Pertanaman.

Tabel 4.4.  
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian	240.464.420.000
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	113.500.000.000
Jaringan Irigasi Tertier	82.880.000.000
Irigasi Air Permukaan	9.920.000.000
Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	20.700.000.000
Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	12.582.830.000
Cetak Sawah	10.482.650.000
Konservasi Lahan	2.100.180.000
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	103.189.290.000
Alat dan Mesin Pertanian	103.132.290.000
Layanan Perkantoran	57.000.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3.686.160.000
Layanan Perkantoran	3.686.160.000
Fasilitas Pupuk dan Pestisida	7.506.140.000
Layanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	6.126.140.000
Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	1.380.000.000

## 2. Permasalahan dan Solusi :

### a. Permasalahan

Dalam melaksanakan program pengembangan prasarana dan sarana pertanian, permasalahan yang ada antara lain : 1) UU No. 41/2009, Perda No.27/2010 dan PP No.1/2011 belum terimplementasikan secara menyeluruh di wilayah Provinsi Jawa Barat sehingga alih fungsi lahan masih tetap ada di Kab/Kota; 2) Kondisi fisik jaringan irigasi pada umumnya dalam keadaan kurang baik; 3) Adanya konflik kebutuhan dan pemanfaatan sumber air; 4) Petani masih beranggapan bahwa operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi tanggung jawab Pemerintah; 5) Kondisi modal usaha petani masih sangat terbatas; dan 6) Belum menyeluruh penerapan teknologi usahatani terutama di kalangan petani pemula.

### b. Solusi

Sosialisasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Melaksanakan program melalui upaya penguatan kelembagaan (Capacity Building) pengelola irigasi (KPI) pertanian beririgasi guna mendukung ketahanan pangan; Memperbesar kapasitas produksi; Mengembangkan pendekatan partisipatif; Mewujudkan kemandirian masyarakat; Membangun kreativitas petani; Menciptakan keselarasan techno-farming dan eco-farming; Membangun sistem kemandirian; Mengoptimalkan pemanfaatan irigasi tidak



saja untuk padi; Desentralisasi kewenangan pengelolaan irigasi; Konservasi lingkungan berkelanjutan integrasi dengan program lain; Bimbingan teknis dan pelatihan; Fasilitasi kelembagaan P3A/GP3A; Fasilitasi kemitraan; Peningkatan daya guna lahan; Evaluasi kinerja usaha tani; Peningkatan peran serta masyarakat petani menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan irigasi dan lahan yang berkelanjutan; Perlu adanya keberlanjutan dan penguatan peran dari kelembagaan pengelolaan irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Membangun komitmen antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk keberlanjutan pengelolaan lahan dan pengembangan irigasi.

#### 4.4.2 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 memperoleh anggaran yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari 2 (dua) Direktorat Jenderal (Ditjen) Lingkup Kementerian Pertanian yaitu sebesar Rp.22.061.479.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.332.496.000,- atau 69,50% dan realisasi fisik mencapai 100,%, yang terbagi dalam 2 (dua) program utama sebagai berikut:

##### A. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan bersumber dari Ditjen Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.244.979.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 14.526.566.000,- atau 68,42% dan realisasi fisik mencapai 100,%.

Tabel 4.5.  
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

PROGRAM/ KEGIATAN		Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Fisik)
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan		21.244.979.000	14.526.566.000	68,42	100,00
1	Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP)	10.927.469.000	8.142.416.000	74,51	100,00
2	Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)	3.415.750.000	3.196.065.000	93,57	100,00
3	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP)	737.920.000	736.980.000	99,87	100,00
4	Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP)	5.194.000.000	1.582.829.000	30,47	100,00
5	Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	601.900.000	510.272.000	84,78	100,00
6	Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (TP)	367.940.000	169.790.000	47,43	100,00

## 1. Pelaksanaan Program

### a. Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar,

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 10.927.469.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan September 2016 sebesar Rp.3.622.144.250,- (33,15%) dan realisasi fisik sebesar 50,00%. Output dari kegiatan ini adalah Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar selama 12 bulan; Pengembangan Tanaman Penyegar seluas 1.010 Ha. Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah terkawalnya kegiatan peremajaan karet selama 12 bulan; terfasilitasinya insentif tenaga kontrak pendamping (TKP) revitalisasi perkebunan selama 11 bulan; rehabilitasi kebun tanaman teh di kabupaten Majalengka seluas 100 Ha, kabupaten Purwakarta seluas 100 Ha dan kabupaten Bandung Barat seluas 50 Ha; intensifikasi kebun tanaman teh di Kabupaten Bandung seluas 250 Ha, Kabupaten Sukabumi seluas 100 Ha, Kabupaten Purwakarta seluas 100 Ha, Kabupaten Bandung Barat seluas 60 Ha, dan Kabupaten Majalengka seluas 200 Ha; intensifikasi kebun tanaman kopi seluas 50 Ha di Kabupaten Bandung Barat.

Permasalahan yang terjadi: terdapat komponen bantuan saprodi yang terkena penghematan dari pusat sehingga paket bantuan tidak utuh.

Solusi yang diambil: untuk pengadaan saprodi yang terkena penghematan petani disarankan dengan cara swadaya.

### b. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan

Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 3.415.750.000,-, realisasi anggaran sampai dengan September 2016 sebesar Rp. 2.135.667.000,- (62,52%) dan realisasi fisik sebesar 70,20%. Output dari kegiatan ini adalah: penanganan OPT tanaman perkebunan seluas 150 Ha; Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun sebanyak 2 Poktan; Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan sebanyak 8 desa. Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah terkendalinya OPT Tebu (Tikus) pada lahan tebu seluas 150 Ha di kabupaten Indramayu; terbangunnya desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan di Jawa Barat sebanyak 8 desa.

Permasalahan yang terjadi: terdapat kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun yang terkena penghematan dari pusat, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Solusi yang diambil: realokasi kegiatan yang sama pada tahun berikutnya.

- c. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP)
- Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 737.920.000,-, realisasi anggaran sampai dengan September 2016 sebesar Rp. 346.010.000,- (46,89%) dan realisasi fisik sebesar 57,62%. Output dari kegiatan ini adalah Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya sebanyak 2 Dokumen. Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah tertibnya administrasi kegiatan Dana Tugas Pembantuan selama 12 bulan; tertibnya pengelolaan dan penataan BMN selama 12 bulan; terfasilitasinya operasional tim teknis sebanyak 36 orang.
- Permasalahan yang terjadi masih terdapat aset peralatan dan mesin yang belum dihapuskan.
- Solusi yang diambil adalah berkoordinasi dengan KPKNL setempat terkait proses penetapan status penggunaan (PSP) dan penghapusan.
- d. Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
- Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 5.194.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 914.360.000,- (17,60%), dan realisasi fisik sebesar 25,35%. Output dari kegiatan ini adalah pengembangan tanaman semusim seluas 710 Ha. Adapun Outcome, terbangunnya kebun nilam seluas 10 Ha di Kabupaten Kuningan; fasilitasi operasional TKP dan PLP-TKP Tebu sebanyak 19 orang; tersajinya data taksasi dan rendeman tebu di Jawa Barat sebanyak 1 dokumen.
- Permasalahan yang terjadi: kegiatan bongkar ratoon dan rawat ratoon Tebu mengalami penghematan anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- Solusi yang diambil realokasi kegiatan yang sama pada tahun berikutnya.
- e. Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Usaha Perkebunan
- Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 601.900.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan September 2016 sebesar Rp. 376.861.700,- (62,61%) dan realisasi fisik sebesar 76,18%. Output dari kegiatan ini adalah pengembangan pengolahan dan pemasaran usaha perkebunan sebanyak 2 Poktan. Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya alat pasca panen kopi di Kabupaten Kuningan dan Bandung sebanyak 2 unit. Permasalahan yang terjadi yaitu adanya penghematan anggaran dari pusat sehingga beberapa kegiatan pendukung tidak dapat dilaksanakan.

Solusi yang diambil adalah realokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

f. Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 367.940.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 169.790.000 (46,15%) dan realisasi fisik sebesar 65%. Output dari kegiatan ini adalah penyediaan benih unggul tanaman perkebunan seluas 3 Ha. Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah terbangunnya kebun benih sebar tanaman Nilam di Kabupaten Kuningan seluas 3 Ha. Permasalahan yang terjadi: data calon petani calon lahan (CP/CL) dari kabupaten sering berubah-ubah sehingga pelaksanaan kegiatan terhambat.

Solusi yang diambil dilakukan validasi data CP/CL serta percepatan penetapan kelompok tani calon penerima.

- B. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian  
 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian bersumber dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.816.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 805.930.000,- atau 98,73% dan realisasi fisik mencapai 100, %.

Tabel 4.6.  
 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

PROGRAM/ KEGIATAN		Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi (Fisik)
			(Rp)	(%)	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian		816.500.000	805.930.000	98,73	100,00
1	Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (TP)	400.000.000	400.000.000	100,00	100,00
2	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP	416.500.000	405.930.000	97,46	100,00

1. Pelaksanaan Program

a. Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

Kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 400.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.400.000.000,- (100%). Output kegiatan ini adalah Dokumen Data Lahan Petani bidang Perkebunan sebanyak 2000 Persil yang dibagi menjadi 800 Persil di Kab. Kuningan, 200 Persil di Kab. Bandung, 500 Persil di Kab. Ciamis dan 500 Persil di Kab. Pangandaran. Outcome kegiatan ini adalah terfasilitasinya pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

Permasalahan yang dihadapi adalah adanya perbedaan usulan jumlah persil untuk tahap Sertifikasi Lahan Perkebunan tahun 2017 di Kabupaten Ciamis dengan jumlah 500 persil dengan yang ditetapkan oleh BPN sejumlah 150 persil.

Solusi yang diambil adalah melakukan koordinasi dan inisiasi dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI. Tahapan Kegiatan meliputi persiapan melalui Pertemuan Koordinasi, dilanjutkan dengan pelaksanaan survey oleh Tim yang beranggotakan Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kabupaten, Pihak BPN Kabupaten, dan Aparat Desa Setempat. Kegiatan berikutnya mendata dokumen kepemilikan Lahan Perkebunan milik Petani sesuai usulan.

b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 416.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 405.930.000,- (97,46%). Output Kegiatan ini adalah pertemuan koordinasi meliputi: pertemuan perencanaan, pertemuan sinkronisasi penertiban asset, pertemuan penyusunan SAI, pertemuan monitoring dan evaluasi, pertemuan percepatan pelaksanaan kegiatan. Outcome terwujudnya koordinasi baik dengan tingkat pusat maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan teknis, pengawasan, pendampingan, pembinaan, perencanaan dan pelaporan kegiatan lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Permasalahan yang dihadapi adalah para pelaku usaha perkebunan belum sepenuhnya memahami tentang mekanisme perencanaan dan pengajuan proposal secara on line. Solusi yang diambil pertemuan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait.

#### 4.4.3 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Pada Tahun 2016, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat memperoleh anggaran yang bersumber dari dana tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp. 21.244.979.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.526.566.000,- atau 68,42% dan realisasi fisik mencapai 100 %, dalam program utama sebagai berikut :

A. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat  
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat bersumber dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.244.979.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.526.566.000,- atau 68,42% dan realisasi fisik mencapai 100 %. Adapun kegiatan dalam program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat, meliputi:

1. Pelaksanaan Program

a. Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan

Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Rp. 2.436.820.000,-, realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi anggaran mencapai Rp.2.205.828.158,- atau sebesar 90,52 %. Output : 1) berkembangnya areal hijauan pakan ternak berkualitas seluas 14 hektar di 2 UPTD di Kabupaten Garut dan Cianjur dan areal hijauan pakan ternak berkualitas di 4 (empat) kabupaten pada 5 SPR dengan luas areal 50 hektar. 2) Tersedianya pakan konsentrat sapi perah laktasi dengan kandungan PK 16 dan TDN 70% sebanyak 90 ton tersebar di 4 (empat) kelompok di Kabupaten Kuningan. Outcome : Meningkatnya Produksi susu sapi perah di 4 kelompok peternak sapi perah minimal 2 liter per ekor per hari.

b. Kegiatan Peningkatan Produksi Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak.

Kegiatan Peningkatan Produksi Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak dengan alokasi anggaran Rp. 4.187.369.000,-, realisasi fisik 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.764.101.754,- atau sebesar 66,01%. output: 1) Tersedianya kandang kolon di peruntukkan sapi perah pada 3 (tiga) kelompok di 3 Kabupaten dan terdistribusinya sapi potong indukan sebanyak 156 Ekor pada 12 kelompok di 5 Kabupaten; 2) Tersebarnya kambing perah sebanyak 66 Ekor tersebar pada 2 kelompok di 2 kabupaten; 3) Tersebarnya ternak domba Garut/Priangan sebanyak 33 Ekor tersebar pada 1 kelompok ternak di 1 kabupaten; 4) Tersebarnya ternak itik lokal sebanyak 550 ekor dan ayam sentul sebanyak 275 Ekor masing - masing tersebar pada 2 kelompok dan 1 kelompok di 2 kabupaten. Outcome: Berkembangnya kelompok pembudidaya sapi potong, kambing perah, domba Garut/Priangan, ayam sentul dan itik lokal di 8 kabupaten.

c. Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

- Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

Tujuannya adalah meningkatnya mutu dan produk olahan daging di Kota Bandung. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 167.900.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 142.231.000,- atau 84,71 %. Output: termanfaatkannya sarana gedung dan alat pengolahan daging. Outcome: 1) Meningkatnya produksi sosis menjadi 800 kg/bulan 2) Meningkatnya pemasaran produk sosis.

- **Fasilitasi Pengolahan unggas dan aneka ternak**  
Kegiatan Fasilitasi Pengolahan unggas dan aneka ternak tujuannya adalah meningkatnya mutu dan produk olahan daging unggas di Kabupaten Majalengka dan Kota Tasikmalaya. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 417.820.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 390.716.500,- atau 93,51 %. Output : termanfaatkannya sarana gedung dan alat pengolahan daging unggas dan produk unggas lainnya di kelompok Mekar Wangi Kabupaten Majalengka dan KWT Intra di Kota Tasikmalaya. Outcome : 1) Meningkatnya produksi abon ayam dari 50 - 75 kg/minggu menjadi 100 kg/minggu serta telur asin dari 500 butir/hari menjadi 1000 butir/hari. 2) Kelompok termotivasi untuk menerapkan cara produksi yang baik . 3) Kelompok termotivasi dengan membuat inovasi produk.
- **Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak di Kabupaten Cirebon**  
Output kegiatannya adalah terbangunnya fasilitas sarana pasar ternak berupa jalan, instalasi air, unit penampung limbah dan gerbang pasar ternak serta peralatan pasar ternak sebanyak 1 unit di pasar ternak Ciledug, Kabupaten Cirebon. Outcome kegiatannya adalah terdapatnya peningkatan akses pemasaran dan jumlah ternak yang dipasarkan di pasar ternak sebanyak 25%, serta kemudahan dan kenyamanan bagi para peternak dan pedagang ternak dalam memasarkan ternak.

#### 4.4.4 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Program dan kegiatan yang difasilitasi dana Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.693.500.000,- yang terdiri dari Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp.1.200.000.000,- dan Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya sebesar Rp.2.493.500.000,- dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut :

##### A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap bersumber dari Dirjen Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp.1.159.152.500,- atau 96,60%. Adapun kegiatan dalam program pengelolaan perikanan tangkap, meliputi:

1. Pelaksanaan Program

a. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.159.152.500,- atau 96,60%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan rumah ikan (Fish Apartemen) sebanyak 4 (empat) unit untuk Kabupaten Karawang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan.

2. Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan

Secara umum pelaksanaan program berjalan lancar, namun dalam pencapaian outcome masih terdapat beberapa permasalahan yaitu :

- 1) Struktur armada penangkapan masih banyak menggunakan armada penangkapan tradisional;
- 2) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perikanan seperti prasarana TPI/PPI; dan
- 3) Menurunnya stok sumber daya ikan di laut dan perairan umum dikarenakan terjadi degradasi kualitas lingkungan.

b. Solusi

- 1) Dilakukan upaya restrukturisasi armada penangkapan diantaranya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- 2) Dilaksanakan pengembangan PPI/TPI melalui penyempurnaan sarana dan prasarana;
- 3) Dilakukan upaya rehabilitasi lingkungan perairan yang ditindaklanjuti dengan pengkayaan stok sumber daya ikan.

B. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap bersumber dari Dirjen Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.493.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 2.421.608.000,- atau 97,11%. Adapun kegiatan dalam program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, meliputi:



## 1. Pelaksanaan Program

### a. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.387.900.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.316.128.000,- (96,99%). Output kegiatan adalah terpenuhinya jumlah induk unggul sebanyak 50.000 ekor; dan unit pembenihan yang menggunakan induk unggul sebanyak 12 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 221.736,58 Ton.

### b. Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.105.480.000,- (99,89%). Output kegiatan adalah dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran sebanyak 2 (dua) dokumen, dokumen pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya 18 dokumen, dan layanan perkantoran 12 bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya tertib administrasi kegiatan.

## 2. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun dalam pencapaian outcome masih terdapat beberapa permasalahan yaitu :

- 1) Kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan masih rendah; dan
- 2) Sarana dan prasarana budidaya masih rendah.

### b. Solusi

- 1) Dilakukan peningkatan penyediaan induk/benih yang berkualitas dengan menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); dan
- 2) Dilakukan peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya.

## 4.4.5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2016 yang dibiayai Pemerintah Pusat melalui APBN. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 menerima anggaran Tugas

Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.436.984.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp 15.984.246.774 (15,16%). TPOP ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP) Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.436.984.000,00,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 103.292.834.824,- (97,97 %) dan progress fisik 100% , kegiatan terdiri dari :

1. Kegiatan Survey dan Investigasi;
2. Kegiatan Operasi Rutin;
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin;
4. Kegiatan Pemeliharaan Berkala; dan
5. Kegiatan pelaporan secara Elektronik.

Anggaran dan kegiatan tersebut diantaranya untuk membayar upah kerja pengelola OP, Petugas Pintu (PPA), Petugas Operasi Bendung (POB), Pekarya Saluran (PS) sebanyak 2.296 orang yang dibayar selama 12 bulan di 17 (tujuh belas) Daerah Irigasi Kewenangan Pusat. Adapun dari 5 (lima) kegiatan SKPD Tugas pembantuan Operasi dan pemeliharaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, mencakup 17 (Tujuh belas) Daerah Irigasi kewenangan pusat, terdiri dari:

1. Operasi dan Pemeliharaan Rutin

Operasi dan pemeliharaan rutin terhadap 17 Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat antara lain :

1. Daerah Irigasi Cipamingkis Kab. Bogor dan Kab. Bekasi
2. Daerah Irigasi Jatiluhur Kab. Indramayu, Kab. Bekasi, Karawang, Kab. Subang
3. Daerah Irigasi Cileuleuy
4. Kab. Subang
5. Daerah Irigasi Leuwi Nangka Kab. Subang
6. Daerah Irigasi Cipancuh Kab. Indramayu
7. Daerah Irigasi Cihea Kab. Cianjur
8. Daerah Irigasi Cikarangeusan Kab. Sukabumi
9. Daerah Irigasi Ciletuh Kab. Sukabumi
10. Daerah Irigasi Cikunten I Kab. Tasikmalaya
11. Daerah Irigasi Iakbok Utara Kab. Ciamis dan Banjar
12. Daerah Irigasi Cikunten II Kota dan Kab. Tasikmalaya
13. Daerah Irigasi Rentang Kab. Cirebon, dan Kab. Indramayu

14. Daerah Irigasi Ciwaringin Kab. Cirebon dan Kab. Majalengka
  15. Daerah Irigasi Cikeusik Kab. Cirebon
  16. Daerah Irigasi Seuseupan Kab. Cirebon
  17. Daerah Irigasi Cipanas II Kab. Indramayu
  18. Daerah Irigasi Kamun Kab. Majalengka
- 
2. Operasi dan Pemeliharaan Berkala  
Operasi dan pemeliharaan berkala dilakukan terhadap 17 Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat antara lain:
    1. Daerah Irigasi Cipamingkis Kab. Bogor dan Kab. Bekasi
    2. Daerah Irigasi Jatiluhur Kab. Indramayu, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang
    3. Daerah Irigasi Cileuleuy Kab. Subang
    4. Daerah Irigasi Leuwi Nangka Kab. Subang
    5. Daerah Irigasi Cipancuh Kab. Indramayu
    6. Daerah Irigasi Cihea Kab. Cianjur
    7. Daerah Irigasi Cikaranggeusan Kab. Sukabumi
    8. Daerah Irigasi Ciletuh Kab. Sukabumi
    9. Daerah Irigasi Rentang Kab. Cirebon dan Kab. Indramayu
    10. Daerah Irigasi Ciwaringin Kab. Cirebon dan Kab. Majalengka
    11. Daerah Irigasi Cikeusik Kab. Cirebon
    12. Daerah Irigasi Seuseupan Kab. Cirebon
    13. Daerah Irigasi Cipanas II Kab. Indramayu
    14. Daerah Irigasi Kamun Kab. Majalengka
    15. Daerah Irigasi Cikunten II Kota dan Kab. Tasikmalaya
    16. Daerah Irigasi Lakbok Utara Kab. Ciamis
    17. Daerah Irigasi Cikunten I Kab. Tasikmalaya

B. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1. Pelaksanaan Program

a. Kegiatan Jaringan Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.436.984.000,-, realisasi sebesar Rp.103.292.834.824,- atau keuangan 97,97% dan fisik 100 %.

Output : Terlaksananya Kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi sebanyak 17 Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat yang berada di Provinsi Jawa Barat.

Outcome : Mempertahankan kondisi jaringan irigasi terhadap 17 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan cakupan layanan Jaringan Irigasi yang dipelihara seluas 419,952 Ha. Alokasi dana Program TPOP Tahun 2016 sebesar Rp. 105.436.984.000,- berasal dari APBN Tahun 2016, berikut adalah rinciannya :

Tabel 4.7.  
Alokasi Dana Program TPOP pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat  
Tahun Anggaran 2016

No	DAERAH IRIGASI/ LEMBAGA	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	KEU %	FISIK %
1	Administrasi Kegiatan	1.049.917.000	882.411.713	84,05	100,00
2	Pendaftaran Dan Seleksi	222.160.000	175.117.950	78,83	100,00
3	Survey Dan Investigasi	1.277.000.000	1.270.278.850	99,47	100,00
4	Sistem Pelaporan Secara Elektronik	78.000.000	54.452.600	69,81	100,00
5	Audit Tekhnis Jaringan Irigasi	217.600.000	215.287.500	98,94	100,00
6	Monitoring Dan Evaluasi	147.760.000	129.720.400	87,79	100,00
7	Operasi	53.244.645.000	52.151.573.426	97,95	100,00
8	Pemeliharaan Rutin	25.436.897.000	25.188.685.885	99,02	100,00
9	Pemeliharaan Berkala	23.763.005.000	23.225.306.500	97,74	100,00
Total Pagu		105.436.984.000	103.292.834.824	97,97	100,00

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2016 masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

### (a) Survey dan Investigasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.277.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.1.270.278.850 (99,47%), fisik 100%.

Output : Dokumen laporan AKNOP di 17 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat hasil dari penelusuran/survey jaringan irigasi yang dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan/inspeksi saluran dan bangunan seluruh jaringan irigasi yang melibatkan peran serta dari Staf Pelaksana Kegiatan sebanyak 80 orang dan Kelembagaan O&P di Daerah (UPT/Pengamat, Juru/Mantri Pengairan, P3A/GP3A/ IP3A Mitra Cai).

Outcome : Mengetahui kondisi baik jaringan irigasi pada saluran ataupun bangunan yang diperlukan untuk kebutuhan perhitungan Angka

Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) pada tahun berikutnya.

(b) Kegiatan Operasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.53.244.645.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 52.151.573.426,- (97,95) fisik 100%.

Output : Terlaksananya operasi dan pengaturan Jaringan Irigasi sebanyak 17 Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat yang berada di Provinsi Jawa Barat berupa pekerjaan pengumpulan data (data debit, data curah hujan, data luas tanam, dll); Pekerjaan kalibrasi alat pengukur debit; Pekerjaan membuat Rencana Penyediaan Air Tahunan, Pembagian dan Pemberian Air Tahunan, Rencana Tata Tanam Tahunan, Rencana Pengeringan, dll; Pekerjaan melaksanakan pembagian dan pemberian air (termasuk pekerjaan : membuat laporan permintaan air, mengisi papan operasi, mengatur bukaan pintu); Pekerjaan mengatur pintu-pintu air pada bendung berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir; Pekerjaan mengatur pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur; Koordinasi antar instansi terkait; dan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi.

Outcome : Terkelolanya jaringan irigasi pada 17 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan baik dalam rangka menunjang/mendukung ketahanan pangan nasional.

(c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.25.436.897.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.25.188.685.885 (99,02%), fisik 100%.

Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin melalui perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi Jaringan Irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti berupa pemberian minyak pelumas pada bagian pintu, pembersihan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-semak, pembersihan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran, Pembuangan endapan lumpur di bangunan ukur, dan pemeliharaan tanaman lindung di sekitar bangunan dan di tepi luar tanggul saluran, serta yang bersifat perbaikan ringan berupa penutupan lubang-lubang bocoran kecil di saluran/bangunan dan perbaikan kecil pada pasangan.

Outcome : Mempertahankan kondisi baik jaringan irigasi pada 17 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Provinsi Jawa Barat

secara terus menerus dalam rangka menunjang/mendukung ketahanan pangan nasional.

(d) Kegiatan Pemeliharaan Berkala

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.23.763.005.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.23.225.306.500 (97,74%), fisik 100%.

Output: Terlaksananya perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala pada saluran irigasi sepanjang 685,02 Km dan 1.623 buah bangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Irigasi dan dapat bekerja sama dengan P3A / GP3A / IP3A secara swakelola maupun kontraktual.

Outcome : Mengembalikan fungsi dan kondisi jaringan irigasi pada 17 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan air ke areal persawahan dalam rangka menunjang/mendukung ketahanan pangan nasional.

(e) Kegiatan Administrasi Kegiatan (AP) & Pendaftaran dan Seleksi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.272.077.000,-, realisasinya sebesar Rp. 1.057.529.663,00 (83,13%) fisik 100%.

Output : Dokumen Administrasi Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di 17 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat.

Outcome : Operasional Pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menjadi lebih lancar dan terukur sesuai dengan target dan rencana.

(f) Kegiatan Pelaporan secara Elektronik

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 78.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 54.452.600 (69,81%), fisik 100%.

Output : Dokumen pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat melalui sistem pelaporan elektronik (E-Monitoring) secara periodik (dwibulanan dan triwulanan).

Outcome : Pelaksanaan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menjadi lebih terkendali.

#### 4.4.6 Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 menerima anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp. 36.895.063.000,- dengan realisasi Rp. 36.311.872.000,- atau 98,42%, realisasi fisik 100%. Anggaran Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Jalan yaitu Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas

Jalan Nasional bertujuan mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan sebagai berikut :

A. Program Penyelenggara Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan bersumber dari Ditjen Bina Marga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.244.979.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 14.526.566.000,- atau 68,42% dan realisasi fisik mencapai 100 %. Adapun kegiatan dalam Penyelenggaraan Jalan, meliputi:

1. Pelaksanaan Program

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 11.798.999.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 11.796.108,- atau 99,98%, realisasi fisik 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan nasional sepanjang 105.60 km. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana.

b. Kegiatan Rehabilitasi Minor

Alokasi anggaran sebesar Rp. 9.198.925.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.198.923.000,- atau 100%, realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah panjang jalan nasional yang direhabilitasi sepanjang 2.50 km, outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jembatan sesuai dengan umur rencana.

c. Kegiatan Rehabilitasi Mayor

Alokasi anggaran sebesar Rp. 11.579.786.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.579.036.000,- atau 99,99%, realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah panjang jalan nasional yang direhabilitasi sepanjang 2.16 km. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jembatan sesuai dengan umur rencana.

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 374.080.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 374.020.000,- atau 99,98%, realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan nasional sepanjang 374,080 m. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jembatan sesuai dengan umur rencana.

e. Kegiatan Sistem Pelaporan (e-Monitoring)

Alokasi dana sebesar Rp. 43.827.000,-, realisasi anggaran Rp. 27.817.000,- atau 63,01%, realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan inputing data keuangan kedalam sistem e-

monitoring. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya dan terupdatenya data keuangan.

f. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Layanan Perkantoran)

Alokasi dana sebesar Rp. 3.899.448.000,- dan realisasi anggaran Rp. 3.336.269.000,- atau 85,56%, realisasi fisik 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran, Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja.

#### 4.4.7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 menerima anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sebesar Rp. 4.331.039.000,- dengan realisasi Rp. 4.076.060.705,- atau 94,11%, realisasi fisik 96,14 %. Anggaran Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.193.807.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 3.941.240.825,- atau 93,98 %. Adapun kegiatan dalam Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, meliputi:

1. Pelaksanaan Program

a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Alokasi anggaran sebesar Rp. 296.110.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 294.005.061,00 atau 99,29%, realisasi fisik 99,29%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelayanan teknis dan administrasi sebanyak 1 Satker. Outcome kegiatan adalah pendudukan terwujudnya pemukiman transmigrasi yang dibangun dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak.

b. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk

Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.591.267.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.341.460.414,- atau 93,04%, realisasi fisik 93,68%. Output kegiatan adalah persebaran penduduk yang tertata di permukiman transmigrasi pada



kawasan transmigrasi sebanyak 217 KK. Outcome kegiatan adalah terwujudnya pemukiman transmigrasi yang dibangun dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak.

c. Kegiatan Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 306.430.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 305.775.350,- atau 99,79%, realisasi fisik 99,79%. Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen kerjasama antar daerah sebanyak 4 naskah. Outcome kegiatan adalah terwujudnya pemukiman transmigrasi yang dibangun dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak.

B. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 137.232.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 134.819.880,- atau 98,24%. Adapun kegiatan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, meliputi:

1. Pelaksanaan Program

a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 137.232.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 134.819.880,- atau 98,24%, realisasi fisik 98,24%. Output kegiatan adalah terlaksananya layanan perkantoran sebanyak 12 bulan. Outcome kegiatan adalah terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang terfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan.

2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Minat bertransmigrasi cukup banyak, sementara target yang tersedia dari pusat terbatas. Upaya Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pusat/Kementrian;
- 2) Kesiapan daerah penempatan dalam pelaksanaan pembangunan pemukiman transmigrasi belum semuanya dapat terselesaikan sehingga berdampak pada realisasi penempatan transmigran asal Jawa Barat tidak sesuai dengan target dan jadwal;
- 3) Masih ada sebagian warga Transmigran yang belum mengoptimalkan lahan yang diberikan oleh Pemerintah;

- 4) Petugas Kab/Kota dalam melaksanakan pendafsi belum mengacu pada Kepmen 208/men/X/2004 sehingga masih ditemukan usia yang melebihi batas usia maksimal; dan
  - 5) Adanya efisiensi volume kegiatan.
- b. Solusi:
- 1) Koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dan daerah penempatan terkait alokasi target;
  - 2) Melakukan koordinasi dengan Kepala UPT dan kabupaten penempatan setempat;
  - 3) Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pendafsi di Kab/Kota; dan
  - 4) Ke depan akan dilakukan penyesuaian kegiatan melalui revisi anggaran.

#### 4.4.8 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

##### A. Program Penyelenggara Jalan

Adapun pelaksanaan Program Pelestarian Budaya yang di biayai APBN pada Tahun Anggaran 2016 melalui dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebesar Rp.1.400.000.000,- untuk kegiatan pelestarian cagar budaya dan permuseuman melalui pembangunan Museum Saung Angklung Udjo sebesar Rp.1.400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.166.721.846,- atau 11,90%, tidak diserap dikarenakan pemblokiran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas kebijakan penghematan anggaran.